

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, DANA ALOKASI UMUM, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BALI**

**Ida Ayu Paramitha Astuti¹
Ida Bagus Putra Astika²**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: mytheadaiu@yahoo.com/ telp: +6283 114 353 669

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pembangunan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2009-2013, jumlah data diperoleh sebanyak 45 amatan. Data dianalisa menggunakan teknik analisis linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Melalui analisis uji t diketahui bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Kata Kunci: jumlah penduduk, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

Development on continuous to improve the lives and well-being of all walks of life. The purpose of this study was to analyze the effect of the population, the general allocation fund and special allocation funds towards public welfare Regency/ City in the province of Bali. This research was conducted in the province of Bali with using secondary data from the years 2009-2013, the amount of data obtained by 45 observations. Data were analyzed using multiple linear analysis techniques. Based on the analysis, the general allocation fund and special allocation funds have a positive influence on people's welfare Regency / City in the province of Bali, while the number of people negatively affect public welfare Regency / City in the province of Bali. Through the analysis of the t test is known that the general allocation fund and special allocation funds have a positive influence on people's welfare Regency / City in the province of Bali, while the number of people negatively affect public welfare Regency / City in the province of Bali.

Keywords: population, the general allocation fund, the special allocation fund, public welfare

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di setiap daerah adalah bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah adalah dalam rangka perjuangan Negara Indonesia untuk mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sepenuhnya merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan, dapat melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, menjadikan barang dan jasa yang dihasilkan Indonesia dapat bersaing di pasar dunia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga memiliki ciri-ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang bertujuan meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pembangunan (BPS, 2007). Keberhasilan pembangunan manusia dapat memberikan dampak pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas.

Pembangunan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Beberapa teori menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan salah satunya dapat diukur dari pertumbuhan ekonominya. Menurut Todaro (2006) bahwa ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal yang meliputi semua bentuk investasi baru dalam tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan dibidang kesehatan, pendidikan, dan

keterampilan kerja. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Kemajuan teknologi yang secara luas diterjemahkan sebagai cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan. Dinamika penanaman modal berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, juga mencerminkan naik turunnya pembangunan ekonomi. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara/daerah senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pemberian otonomi dilaksanakan melalui desentralisasi, dekonsentrasi, penugasan dan pembantuan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesungguhnya pemberian otonomi kepada daerah adalah sarana untuk memperlancar penyelenggaraan negara sebagai tugas Pemerintah NKRI dengan tujuan yang jelas yaitu meningkatkan dan memperlancar pembangunan di Daerah, terutama dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, baik dibidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan maupun kesehatan, memperlancar, mempermudah pelayanan administrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan wilayah baik pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan

sumber daya manusia, meningkatkan keikutsertaan masyarakat daerah dalam penentuan kebijakan publik baik yang bersifat nasional maupun bersifat terbatas dan memperkuat persatuan dan keatuan bangsa serta memperkuat ketahanan dan pertahanan nasional disemua bidang (LAN, 2008).

Titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II, dengan dasar pertimbangan bahwa dari dimensi politik Dati II dianggap kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, dari dimensi administratif penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif, Dati II adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga dianggap lebih tahu kebutuhan dan potensi daerahnya serta yang terakhir dapat meningkatkan local accountability Pemda terhadap rakyatnya (Kuncoro, 2004) .

Peranan penduduk dalam pembangunan sangat penting, sesuai dengan asumsi klasik bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar merupakan gambaran tersedianya pasar yang luas dan jaminan tersedianya input faktor produksi. Pertambahan jumlah penduduk yang besar mempunyai implikasi yang luas terhadap program pembangunan, karena pertambahan penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pembangunan (Arjoso, 2006).

Penduduk dapat merupakan faktor pendukung dan juga sebagai faktor penghambat dalam pembangunan. Penduduk sebagai pendukung atau modal pembangunan karena dengan jumlah penduduk besar dapat menyediakan tenaga kerja yang besar yang dapat bertindak sebagai produsen dan juga sebagai

konsumen utama terhadap hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan akan berkontribusi tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penduduk dikatakan sebagai faktor penghambat apabila jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pemerintah dalam pembangunan (Suparmoko, 2002). Disisi lain penduduk selaku obyek dan sasaran dalam pembangunan memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah sebagai dasar membuat perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan dan pengalokasian anggaran belanja khususnya melalui belanja langsung untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan sumber-sumber pembiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beranjak dari ketentuan tersebut memberikan konsekuensi terhadap kewenangan yang jelas dan luas serta bertanggung jawab secara proporsional di bidang Pendapatan Daerah yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan potensi sumber daya, guna membiayai otonomi daerah sesuai dengan tigtkatan Daerah Otonom. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa Pembiayaan Otonomi Daerah bersumber dari Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah (PD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro, 2004). Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah yang pembagiannya telah diatur berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004, maka pemberian otonomi diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi yang berdampak terhadap terciptanya perluasan kesempatan kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Sama seperti sumber pendapatan daerah lainnya PAD dan Lain-Lain (*Pendapatan yang Sah*), dana perimbangan dimaksud digunakan untuk membiayai pembangunan daerah melalui belanja langsung dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pembangunan infrastruktur daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan dengan pendekatan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pendekatan bidang sosial kemasyarakatan. Untuk meningkatkan SDM, harus ada keterlibatan secara berkelanjutan dari

pemerintah dalam pendekatan pembangunan di berbagai bidang selain pendekatan politik yang dilakukan selama ini, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, buta huruf, tingkat kematian ibu dan bayi, serta kesenjangan sosial lainnya antar kabupaten/kota. Tujuan inti pembangunan dalam arti luas adalah membangun manusia seutuhnya yang tidak saja mencakup aspek biologis, aspek intelektualitas dan aspek kesejahteraan ekonomi semata, tetapi juga aspek iman dan ketakwaan juga mendapat perhatian yang besar (Nehen, 2012). Pembangunan manusia yang berhasil sebetulnya juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Dengan kata lain terdapat hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (Ranis , 1998 dalam BPS, 2007).

Pengalaman pembangunan pada beberapa negara terdapat pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia beberapa hal dapat dilakukan antara lain melalui distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, berbagai upaya dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “*pembayaran transfer*” dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan sebagainya (Todaro, 2006).

Menurut Arsyad (2005) bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung aspek pembangunan manusia dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah

untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Besarnya proporsi anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kedua sektor tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dalam sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi sehingga masyarakat dapat menikmati langsung manfaat dari pembangunan daerah yang berdampak terhadap kesejahteraan.

Informasi tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu masukan yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Beberapa indikator tingkat kesejahteraan telah dikembangkan sebagai dasar dalam mengamati pola kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Saat ini penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai indikator kesejahteraan memperoleh penerimaan secara luas di seluruh dunia, bahkan telah memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia dari sisi ekonomi (*daya beli*), kesehatan maupun pendidikan (Nehen, 2012). HDI merupakan manfaat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro, 2003). Salah satu keuntungan HDI adalah index, ini mengungkapkan bahwa sebuah negara /daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia (Hadi Sasana, 2009).

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari IPM yang meningkat yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Dalam penelitian ini digunakan IPM sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk rangking kesejahteraan suatu daerah. Nilai IPM Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan dari 70,53 pada tahun 2009 menjadi 72,62 pada tahun 2013, namun angka ini masih berada dibawah nilai IPM yang ditargetkan Pemerintah Provinsi Bali sebesar 72,64 pada tahun 2013, tetapi secara nasional IPM Provinsi Bali pada tahun 2013 menduduki peringkat 16 (Biro Ekbang Provinsi Bali, 2013). Peningkatan ini juga terjadi pada empat kabupaten dan kota yang nilainya secara rata-rata berada di atas IPM Provinsi Bali dan bahkan diatas IPM Nasional. Namun masih terdapat empat IPM kabupaten hampir setiap tahun berada dibawah rata-rata Provinsi Bali, dan empat IPM kabupaten yang berada dibawah IPM Provinsi Bali adalah Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli dan Buleleng .

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dengan IPM sebesar 78,80 dan 75,69 pada tahun 2013 serta laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,18 persen untuk Kota Denpasar dan 7,30 persen untuk Kabupaten Badung pada tahun 2013 (BPS, 2013) tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong terciptanya iklim investasi serta pengelolaan keuangan daerah melalui pengalokasian belanja langsung dalam proses pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran konsumsi masyarakat (C) dan pengeluaran investasi swasta (I), selanjutnya berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan akhirnya dapat berdampak terhadap pengeluaran pemerintah (G) dalam perekonomian. Meningkatnya pengeluaran pemerintah tersebut akan mendorong naiknya permintaan barang dan jasa dalam perekonomian sehingga produksi meningkat. Peningkatan produksi diberbagai sektor tentu membutuhkan tambahan tenaga kerja, disisi produksi adanya pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tambahan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan teori pertumbuhan (Harrod-Domar dalam Todaro, 2006) dinyatakan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal.

Beberapa hasil kajian berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Rizal Rachman (2010) dengan hasil penelitian bahwa dengan analisa IW di Kabupaten Gresik ternyata investasi bermanfaat terhadap pendapatan perkapita tapi tidak bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Sidoarjo ternyata investasi bermanfaat terhadap pendapatan per kapita tapi kurang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Pasuruan ternyata investasi tidak bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat tapi mempunyai manfaat dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Hadi Sasana:2009 hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, tenaga kerja berpengaruh positif dan

signfikan terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian Ihyaul Ulum (2005) dinyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah Provinsi di Indonesia. Demikian juga Penelitian yang telah dilakukan oleh Lilis Setyowati (2012) hasilnya diperoleh bahwa DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian Belanja Modal, dan Belanja Modal juga berpengaruh positif terhadap IPM sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui belanja Modal.

Masalah penelitian adalah (1) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2009-2013? (2) Bagaimana pengaruh dana alokasi umum pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2009-2013? (3) Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2009-2013?

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh jumlah penduduk, dana alokasi umum dan dana alokasi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2009-2013.

Kegunaan penelitian secara akademik adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wahana untuk mengimplementasikan konsep-konsep teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan serta meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian tentang pengaruh jumlah penduduk, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kegunaan praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Provinsi Bali dalam mengambil kebijakan pembangunan khususnya berkaitan dengan perencanaan anggaran /pengalokasian belanja langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *welfare state otto* dan kemanfaatan (*Utility*). Teori *Welfare State Otto* mengemukakan prinsip dasar teori *Welfare State*, yakni bahwa negara/pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun (Abercrombie, 2000:382). Otto menyampaikan konsep kesejahteraan (sosial *welfare*) tersebut secara konkret ke dalam bentuk model program kesejahteraan masyarakat bagi hasil pemerintah modern (*The model of modern goverment social security*).

Teori Kemanfaatan (*Utility*) Pada pengelolaan pajak agar sesuai dengan makna otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan pada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayar pajak dapat merasakan manfaat atas pembayarannya, diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara sukarela. Pemungutan pajak daerah harus mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Secara umum pemungutan pajak daerah harus dilihat dari dua sisi yakni, sisi hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah bersangkutan.

Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas

maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Liyasmi (2015) menyatakan semakin meningkat jumlah penduduk berpengaruh negatif pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Stefandy *et al.* (2014) jumlah penduduk suatu daerah sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin banyak jumlah penduduk akan menuntut pelayanan sosial dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Alit dan Sudiana (2013) menyatakan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan berimplikasi negatif terhadap perencanaan pembangunan yang berkaitan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan penduduk dihubungkan dengan kesejahteraan penduduk dianggap sebagai faktor negatif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

H₁: Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Setiap daerah dalam menghadapi otonomi berbeda-beda. Bagi daerah yang kaya akan sumber daya, kesiapannya tentu lain dengan daerah yang miskin sumber daya. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik, mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraannya (Junaidi, 2014). Anis dan Ardi (2007) menyatakan variabel DAU berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Mahendra dan Agung (2015) dana alokasi

umum memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Dana alokasi khusus atau dana perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bagus, 2014). Meilen *et al.* (2014) menyatakan variabel DAK berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Ulfi dan Endrawati (2010) dana alokasi khusus memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan rumusan masalah yang bersifat asosiatif dengan hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2010: 55), rumusan masalah asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Sedangkan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2010: 56).

Objek dari penelitian ini adalah meneliti tentang kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada periode 2009-2013. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi perubahan atau timbulnya variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel-variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Masyarakat.

Variabel jumlah penduduk dalam penelitian ini adalah penduduk Bali berumur 15 tahun keatas yang dianggap sudah cakap hukum dan mampu bekerja untuk mendapatkan penghasilan saat ini bekerja di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode tahun 2009-2013 yang dinyatakan dalam satuan orang.

Rumus jumlah penduduk :

$$P = (L - M) + (I - E) \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

P = Pertumbuhan penduduk

L = Jumlah kelahiran

M = Jumlah kematian

I = Jumlah imigrasi

E = Jumlah emigrasi

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk hasil dari jumlah penduduk, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat. Data Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengungkapan informasi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengenai kependudukan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Bali dan data kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan telah dipublikasikan oleh pihak-pihak lain: seperti data jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, data dana perimbangan di kabupaten/kota Provinsi Bali, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Bali dan data kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Arfan Ikhsan, 2008:117). Populasi penelitian ini adalah terdaftar di Badan Pusat Statistik pada tahun 2009-2013. Sampel adalah sebagian dari elemen – elemen populasi. Metode pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, pertama data yang terdaftar di BPS dan menerbitkan laporan pertumbuhan penduduk setiap tahun secara lengkap. Kedua data yang terdaftar di BPS, yang

mengungkapkan tanggung jawab dalam laporan tahunan secara terperinci untuk periode selama tahun 2009-2013.

Seluruh data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi non partisipan. Metode observasi non partisipan dilakukan dengan mengamati secara langsung dokumen yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, seperti Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diperlukan informasinya dalam kaitan penelitian ini. Contohnya dengan melakukan wawancara mengenai data yang kita gunakan terhadap para pegawai di BPS. Hasil wawancara ini digunakan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian ini.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara regresi linear berganda, untuk mengetahui ketergantungan suatu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Analisis ini juga dapat menduga arah dari hubungan tersebut serta mengukur derajat keeratan hubungan antara satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. Dalam analisis, peneliti dibantu dengan program computer *Statistical Pacage of Social Science (SPSS) versi 15.0 for Windows*. Adapun bentuk umum dari persamaan regresi linier berganda menurut (Wirawan, 2002:293) sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

Y = kesejahteraan masyarakat

x₁ = jumlah penduduk

- x_2 = dana alokasi umum
- x_3 = dana alokasi khusus
- α = Konstanta
- b_1, b_3 = Koefisien regresi dari X_1-X_3
- ε = Variabel pengganggu (residual error) yang mewakili faktor lain berpengaruh terhadap Y namun tidak dimasukkan dalam model.

Penelitian ini menggunakan statistik parametrik dengan model regresi berganda, maka sebelumnya perlu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi: Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel-variabel bebas. Jika terjadi kolerasi maka dinamakan terjadi problem multikolonieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel-variabel bebas. Menurut (Umar, 2007:198) sebagai pedoman untuk mengetahui satu model yang bebas multikol adalah mempunyai nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka *tolerance* tidak kurang dari 0,1.

Uji heteroskedastisitas menurut (Ghozali, 2007:105) tujuan dari asumsi ini adalah menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedasitas jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam perhitungan *SPSS* untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu

pada grafik heteroskedastisitas dimana sumbu X dan Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah distandardized sebagai dasar pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali yaitu melalui Kantor Biro Pusat Statistik Provinsi Bali untuk memperoleh data mengenai jumlah penduduk, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus menyangkut kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Penentuan sampel dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1.
Seleksi Penentuan Sampel

No	Variabel	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jml. Pdd	2,029,730	2,057,118	2,177,358	2,204,874	2,268,708
2	DAU	2.942.937.408	3.059.667.939	3.014.662.887	4.344.335.578	4.932.190.380
3	DAK	307.818.771	325.213.800	277.638.700	314.503.020	354.773.060
4	IPM	643.56	647.91	651.31	656.14	661.47

Sumber: Olah data, 2016

Hasil analisis statistik deskriptif data uji yang diolah dengan menggunakan SPSS. Statistik deskriptif menyajikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yaitu jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan standar deviasi. Untuk mengukur nilai sentral dari distribusi data dapat dilakukan dengan pengukuran rata-rata (*mean*) sedangkan standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 dapat dilihat variabel jumlah penduduk (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 167623,18, nilai maksimum sebesar 6343300,00, mean sebesar

395618,3, dan standar deviasi sebesar 142607,2. Ini berarti bahwa terjadi perbedaan nilai jumlah penduduk yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 142607,2.

Tabel 2.
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviasi
Jml. Pddk.	45	167623,18	634300,00	395618,3	142607,2
DAU	45	280,71	655,35	450,7	79,1
DAK	45	117639,00	1207764,0	295794,8	186021,4
IPM	45	69,66	78,80	73,1	2,2

Sumber: Olah data, 2016

Variabel dana alokasi umum (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 280,71, nilai maksimum sebesar 655,35, mean sebesar 450,7, dan standar deviasi sebesar 79,1. Ini berarti bahwa terjadi perbedaan nilai dana alokasi umum yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 79,1. Variabel dana alokasi khusus (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 117639,00, nilai maksimum sebesar 1207764,0, mean sebesar 295794,8, dan standar deviasi sebesar 186021,4. Ini berarti bahwa terjadi perbedaan nilai dana alokasi khusus yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 186021,4.

Variabel kesejahteraan masyarakat (Y) memiliki nilai minimum sebesar 69,66, nilai maksimum sebesar 78,80, mean sebesar 73,1, dan standar deviasi sebesar 2,2. Ini berarti bahwa terjadi perbedaan nilai dana alokasi khusus yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 2,2.

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi (variabel dependen dan variabel independen ataupun keduanya) memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas nilai residual dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 3.
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters(a,b)	Mean	0,0000000
	Std, Deviation	1,75590812
<i>Most Extreme Differences</i>	Absolute	0,191
	Positive	0,191
	Negative	-0,097
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1,282
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,075

Sumber: Olah data, 2016

Data dikatakan berdistribusi normal jika taraf signifikansi lebih besar dari 0,05. Pada Tabel 3 nilai signifikansi sebesar 0,075 ($0,075 > 0,05$). Hal ini berarti model regresi berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika nilai toleransi lebih dari 10 persen atau VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
JMLH PDDK	0,598	1,673
DAU	0,669	1,496
DAK	0,778	2,285

Sumber: Olah data, 2016

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika tingkat signifikansi berada di atas 0,05 maka model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Jmlh. Pddk.	0,994	Bebas heteroskedastisitas.
DAU	0,854	Bebas heteroskedastisitas.
DAK	0,085	Bebas heteroskedastisitas.

Sumber: Olah data, 2016

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai sig. masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel tersebut bebas heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda diolah dengan bantuan *software* SPSS for Windows dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6.
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. error	Beta		
(constant)	67,295	1,595	-	-	-
Jmlh. Pddk.	-0,001	0,002	-0,092	-0,587	0,560
DAU	0,010	0,004	0,363	2,449	0,019
DAK	0,006	0,002	0,469	3,414	0,001
Adjusted R ²	: 0,355				
F Hitung	: 9,068				
Sig F	: 0,000				

Sumber: Olah data, 2016

Berdasarkan Tabel 6 tersebut dapat dibuat persamaan sebagai berikut.

$$Y = 67,295 - 0,001 X_1 + 0,010 X_2 + 0,006 X_3 + \epsilon \dots \dots \dots (3)$$

Berdasarkan persamaan regresi, dapat dijelaskan nilai konstanta sebesar 67,295, jika nilai jumlah penduduk (X_1), dana alokasi umum (X_2), dan dana alokasi khusus (X_3) sama dengan nol, maka nilai kesejahteraan masyarakat di

Provinsi Bali (Y) tidak meningkat atau sama dengan 67,295satuan. $\beta_1 = -0,001$, jika bila nilai jumlah penduduk (X_1) bertambah 1 satuan, maka nilai dari kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali (Y) akan menurun sebesar -0,001satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. $\beta_2 = 0,010$, jika nilai dana alokasi umum (X_2) bertambah 1 satuan, maka nilai dari kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali (Y) akan bertambah sebesar 0,010 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. $\beta_3 = 0,006$, jika nilai dana alokasi khusus (X_3) bertambah 1 satuan, maka nilai kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali (Y) akan bertambah sebesar 0,006 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dalam regresi moderasi diperoleh nilai signifikansi F sebesar $0,000 \leq \alpha = 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada persamaan regresi linear sederhana dalam Tabel 6 menunjukkan R^2 sebesar 0,355. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa 35,5 persen variabel jumlah penduduk, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus mampu menerangkan variasi variabel kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, Sedangkan sisanya 64,5 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

Berdasarkan uji statistik t pada Tabel 6 menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen yang dimasukkan dalam model merupakan penjelas variabel dependen. Pengaruh jumlah penduduk pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, berdasarkan hasil olahan data SPSS, Tabel 6 menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0,560 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Ini berarti jumlah penduduk berpengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan regresi linear berganda diperoleh hasil yaitu jumlah penduduk berpengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil tersebut didasarkan atas nilai signifikansi jumlah penduduk yaitu $0,560 > 0,05$. Gambaran ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Liyasmi (2015) membuktikan dalam penelitiannya semakin meningkat jumlah penduduk akan memiliki dampak negatif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Stefandy *et al.* (2014) jumlah penduduk suatu daerah sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin banyak jumlah penduduk akan menuntut pelayanan sosial dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Alit dan Suidiana (2013) menyatakan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan berimplikasi negatif terhadap perencanaan peningkatan kesejahteraan penduduk. Hipotesis pertama “Jumlah penduduk berpengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” diterima.

Pengaruh dana alokasi umum pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil olahan data SPSS, Tabel 6

menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti dana alokasi umum berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan regresi linear berganda diperoleh hasil yaitu dana alokasi umum berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil tersebut didasarkan atas nilai signifikansi jumlah penduduk yaitu $0,019 < 0,05$. Gambaran ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidi (2014) yang membuktikan dalam penelitiannya dengan adanya kebijakan otonomi daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik, mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat dan dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anis dan Ardi (2007) menyatakan variabel dana alokasi umum berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Mahendra dan Agung (2015) dana alokasi umum memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hipotesis kedua “Dana alokasi umum berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” diterima.

Pengaruh dana alokasi khusus pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil olahan data SPSS, Tabel 6 menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1

diterima. Ini berarti dana alokasi khusus berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan regresi linear berganda diperoleh hasil yaitu dana alokasi khusus berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil tersebut didasarkan atas nilai signifikansi jumlah penduduk yaitu $0,001 < 0,05$. Gambaran ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bagus, 2014). Meilen *et al.* (2014) menyatakan variabel DAK berpengaruh positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Ulfi dan Endrawati (2010) dana alokasi khusus memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hipotesis ketiga “Dana alokasi khusus berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” diterima.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pertama lokasi penelitian ini hanya di Provinsi Bali yang terdapat di Bali dan hanya meneliti mengenai kesejahteraan masyarakat, sedangkan masih terdapat beberapa lokasi lainnya selain Bali, seperti Jakarta, Surabaya yang lebih luas daripada wilayah Bali. Kedua, penelitian hanya menggunakan teknik analisa regresi linear berganda, sedangkan dapat dikembangkan lagi dengan teknik analisa yang lainnya, seperti: *MRA*, *SEM analisis*, *Path Analisis* dan *AMOS*. Ketiga, penelitian melibatkan subyek yang

terbatas, yakni 45, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada kelompok subyek dengan jumlah yang lebih besar.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka simpulan yang diperoleh adalah pertama, jumlah penduduk berpengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Kedua, dana alokasi umum berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali hasil tersebut menunjukkan semakin baiknya pengalokasian dana, Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, dana alokasi khusus berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali hasil tersebut menunjukkan semakin baiknya proporsi dana Alokasi Umum yang dialokasikan pemerintah pada belanja modal akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat diberikan adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali disarankan untuk mengatasi peningkatan jumlah penduduk dengan meningkatkan pelatihan terhadap calon tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang akan digunakan untuk mencari pekerjaan sehingga mampu bersaing dan bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dengan membuka peluang bagi penduduk pada usia produktif untuk ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Memanfaatkan aksesibilitas yang mudah dijangkau untuk memasarkan hasil UMKM masyarakat. Mencari seluas-luasnya konsumen dan pasar untuk memasarkan hasil UMKM masyarakat.

Kedua, untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka pemerintah diharapkan bisa mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga pemerintah daerah agar terus mengupayakan untuk dapat bisa menarik Dana Alokasi Umum untuk dialokasikan pada sektor publik seperti pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan serta modal bagi masyarakat agar penggunaannya menjadi efisien dan menjadi penerimaan daerah dan pemerintah mesti objektif dan selektif dalam pelaksanaan belanja langsung agar sesuai dengan yang di harapkan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

DAFTAR REFERENSI

- Andaiyani. 2012. Pengaruh Indek Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007-2010.
- Anis Setiyawati dan Hardi Amzah. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 4(2): h: 211-228.
- Ariasih, Pande. & Suyana Utama, I Made. 2012. Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. (Online) tersedia di <http://ojs.unud.ac.id/index.php>.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.

- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIE YKPN.
- Azhari A Samudra. 1995. *Perpajakan di Indonesia :Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. Pendapatan Domestik Regional Domestik Regional Bruto Provinsi Bali. Denpasar Padan Pusat Statistik.
- Bagus Bowo Laksono Subowo. 2014. pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*. 3(4): h: 457-465
- Davey, K. J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI Press.
- Deddy Rustiono. 2008. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro. Tersedia di eprints. undip.ac.id/16937/1/Deddy_Rustiono.pdf
- Departemen Dalam Negeri. 2000. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.
- _____. 2000. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Dinas Pendapatan Provinsi Bali. 2012. Data Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
- Fransisca Roossiana Kurniawati. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal*.
- Gde Alit Wiradyatmika, A.A. dan Suidiana, I Ketut. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 2(6): h: 344-349
- Gde Mahendra Putra, Putu., dan Agung Ulupui, I Gusti Ketut. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 11(3): h: 863-877
- Gilarso, S. J. 2006. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius
- Gregory, Mankiw. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta Salemba Empat.
- Hayati Hehamahua. 2015. Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of

- Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences*. 6(3): h: 15-23
- Ilham Tajuddin, Basri Hasanuddin, Rahmatia, Paulus Uppun. 2014. The Effects Of General Allocation Funds, Special Allocation Funds And Revenue-Sharing Funds On Investment, Economic Growth, Economic Structure, And Employment. *Journal of Research in Business and Management*. 2(10): h:54-61.
- Junaidi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 2(2): h: 63-70.
- Kami Artana, I Nyoman. 2009. “Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali”. *Tesis*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Kesit Bambang Prakosa. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Study Emperik di Wlayah Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Airlangga
- Lilis Setyowati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indek Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal*.
- Liyasmi Ika Harjana. 2015. Analisi Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*. 3(1): h: 1-18
- Meilen Greri Paseki, Amran Naukoko, Patrick Wauran. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 14(3): h: 30-42
- Muchamad Rizal Rachman. 2010. *Analisis Investasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Gresik, Sidoarjo Dan Pasuruan*.
- Nehen, I. K. 2010. *Perekonomian Indonesia*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

- Parmana, Dewa Gede. 2008. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan Perkapita Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali". *Tesis*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 12 Tahun 2008, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 38 Tahun 2008, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Rinawaty Taaha, Yulian. 2013. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Stefandy Dengah, Vecky Rumat dan Audie Niode. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 14(3): h: 71-81
- Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2015. Empirical Study about The Interaction Between Equalization Funds, Regional Financial and Human Development Index in Regional Economic. *International Journal of Economics and Finance*. 7(1): h: 192-202
- Todaro. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.